

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Sumenep)

Insan Rofiqi¹ Abdul Wahid² Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : insanrofiqi99@gmail.com

Abstract

The application of law enforcement against perpetrators of criminal acts committed by children often gets unpleasant treatment and is not in accordance with the orders stipulated in law. Persecution, case fabrication, and intimidation to seek confession from a suspect are often carried out by police officers. This kind of phenomenon certainly violates statutory regulations and injures the Indonesian National Police. This research aims to find out in detail and in-depth about the form of legal protection and the factors that influence the implementation of legal protection for the child perpetrators of criminal theft in the investigation process. This type of research the writer uses is descriptive research, where the writer provides an overview and describes or describes all the real reasons related to legal protection of children. The results of the research that the author did were the Sumenep Police in carrying out their duties as law enforcer is still guided by or refers to the provisions which is regulated in the Law on the Criminal Justice System for Children and the Law on Child Protection and Upholds Human Rights.

Keywords : *Legal Protection, Investigation, Children.*

Abstrak

Penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan ketidak sesuaian dengan perintah yang diatur dalam undang-undang. penganiayaan, rekayasa perkara, dan intimidasi untuk mengejar pengakuan dari tersangka sering dilakukan oleh oknum Kepolisian. Fenomena semacam ini tentu menyalahi peraturan perundang-undangan dan mencederai instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail dan mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum dan faktor yang mempengaruhi diterapkannya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, dimana penulis memberikan suatu gambaran dan mendeskripsikan atau memaparkan semua alasan sebenarnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak. hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah Kepolisian Resort Sumenep dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum adalah tetap berpedoman atau mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Penyidikan, Anak.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Polisi merupakan lembaga penegak hukum yang pertama kali bersentuhan langsung dengan para pelaku kejahatan, sebagai aparat penegak hukum polisi memiliki wewenang dan posisi strategis yang secara legalitas hukum sah untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak seseorang dalam masyarakat, terutama bagi yang dicurigai melakukan suatu tindak pidana. Namun, walaupun demikian ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam hal pembatasan hak-hak seseorang baik itu kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan orang dewasa maupun pelaku tindak pidana yang masih digolongkan sebagai anak-anak. Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan yang menyangkut hak-hak anak pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), juga badan-badan perlindungan anak independen, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak-hak Anak.

Selain dari pada yang disebutkan diatas Pemerintah juga telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan terhadap anak yang menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana pemerintah juga telah membentuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal itu merupakan suatu bentuk nyata hadirnya Negara untuk melindungi warga negaranya utamanya anak. Dalam teori *differential opportunity structure*, Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menyebutkan bahwa: “*delinkuensi* adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah, *delinkuensi* terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara struktural diantara kaum muda (anak) dalam kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah”.

Dalam menyikapi ketentuan tindak pidana anak atau *delinkuensi* anak ini, aparat penegak hukum di Negara kita (Indonesia) belum sepenuhnya melaksanakan apa yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak-Anak pada kesepakatan dalam pertemuan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴ Dalam memperlakukan anak sebagai tersangka, tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana menerima perlakuan tidak sewajarnya.

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem hukum, tentu dalam penyelenggaraan kenegaraan atau bernegara harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau undang-undang

⁴Angger Sigit Pramugti dan Faudy Primaharsha, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta; Pustaka Yustisia, 2015).

yang berlaku dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata. Penegasan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum secara konstitusional telah disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*Machtsstaat*)”. Karena urgensi penegasan dimaksud diatas, maka pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001 kembali ditegaskan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.⁵

Terdapat hal yang cukup urgent dalam Negara yang menganut sistem hukum yaitu, adanya komitmen dan penghargaan untuk senantiasa menjunjung setinggi-tingginya penerapan hak asasi manusia serta jaminan terhadap semua warga Negara yang bersama kedudukannya di dalam hukum. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.⁶ Maka didalam pasal tersebut idealnya tidak hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan, tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya.⁷ Dalam rangka mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, sangat diperlukan adanya produk hukum dimana dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di Negara kita (Indonesia) tentu juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Masa-masa sebagai anak atau pengalaman hidup anak memiliki daya tarik tersendiri, masa anak merupakan masa yang sangat istimewa, akan tetapi dalam masa anak juga terdapat suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang anak. Keberhasilan atau kegagalan anak diawal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor yang paling penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas serta mampu memimpin dan memelihara kesatuan, persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sangat penting adanya pengawasan, kesadaran terhadap anak dan pembinaan yang harus dilaksanakan secara intens demi menjaga kelangsungan hidup yang baik, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa dimasa depan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁵ Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) tentang Negara Hukum.

⁶ Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “*Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya*”.

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Pidana (KUHP) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan penyidikan. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa tidak semua polisi dapat menjadi penyidik seperti halnya dalam penyidikan dimonopoli oleh polisi itu sendiri.

Terdapat beberapa kesalahan yang sering kali terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh oknum penegak hukum (Kepolisian), diantaranya adalah adanya perlakuan yang tidak baik berupa penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan perlakuan kurang menyenangkan lainnya, selain itu penempatan terhadap anak yang melakukan tindakan pidana terkadang sama satu ruang dengan orang dewasa, hal itu tentu merupakan sebuah pelanggaran yang tidak bisa dibenarkan dan tentu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kepolisian dalam melakukan penyidikan termasuk melakukan penangkapan harus menjunjung tinggi hak para tersangka yaitu praduga tak bersalah yang diakui dan dibenarkan oleh undang-undang, tak terkecuali para tersangka yang merupakan golongan anak-anak. Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami tentang masalah hukum yang terjadi kepada dirinya, anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Perlindungan hukum anak di persidangan anak, selain Jaksa Penuntut Umum khusus anak juga Hakim khusus anak. Hakim Anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak dimana hakim anak memiliki pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pendidikan dan andragogi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan oleh penulis menarik untuk dikaji dan diteliti secara lebih detail dan mendalam tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak tersangka pidana serta diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya. Agar dengan adanya

⁸Arfan Kaimuddin, 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum Vol, 8 h. 259

penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang ilmu dan pengetahuan hukum maupun bagi praktisi hukum dalam rangka memperjuangkan penegakan hukum dan dapat memberikan gambaran secara lengkap dan detail mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak didalam KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Sumenep dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan deskriptif, yaitu memberikan data yang akurat tentang manusia, lingkungan, atau gejala-gejala lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori yang baru.⁹ Alasan peneliti menggunakan teori deskriptif adalah untuk memberikan suatu gambaran dan mendeskripsikan atau memaparkan semua alasan sebenarnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian berdasarkan pada ketentuan hukum positif Indonesia.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Sumenep.

Kepolisian Resort Sumenep dalam melakukan tindakan perlindungan hukum dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimana substansi yang diatur dalam Undang-Undang SPPA tersebut antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan, dapat ditempatkan di ruangan khusus anak, terkait penempatan anak yang berkonflik dengan hukum, Kepolisian Resort Sumenep bekerja sama dengan Dinas Sosial yang ada di Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dikarenakan penuhnya sel tahanan (*over capacity*) di Polres Sumenep.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH, Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta

⁹Soejono soekamto, (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. H.2.

Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif, hal itu selaras dengan :

1. Deklarasi PBB Tahun 2000 tentang prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration On The Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters*)
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challenges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif.
3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok Tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)"

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan mengenai kewenangan hakim dalam proses peradilan Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).¹⁰

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang tujuannya adalah untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan

¹⁰Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak.

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan bagi korban meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai.

Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep pendekatan *restoratif justice*¹¹ menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

¹¹Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi, h. 6

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Pada wilayah hukum Kepolisian Resort Sumenep terdapat beberapa kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana, tak terkecuali kasus pencurian yang sering dilakukan oleh anak-anak. Berikut data anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian di Kepolisian Resort Sumenep dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.

Tabel Nomor 1
Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak
di Kepolisian Resort Sumenep

| No. | Tahun | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|
| 1 | 2017 | 4 |
| 2 | 2018 | 3 |
| 3 | 2019 | 2 |
| 4 | 2020 | 2 |
| | Jumlah | 11 |

Sumber : Kepolisian Resort Sumenep

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Teguh Cahyanto, S.H selaku Banit PPA Polres Sumenep pada tanggal 18 Oktober 2020, terdapat faktor internal dan eksternal penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Sumenep, faktor internal diantaranya adalah lemahnya pertahanan diri, lemahnya iman, dan pendidikan yang rendah. Sedangkan pada faktor eksternalnya adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga atau orang tua, pengaruh lingkungan yang kurang sehat, ketidak bijakan dalam

menggunakan teknologi dan faktor ekonomi yang rendah. Sehingga anak sangat mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji seperti mencuri, memalak dan sebagainya. Pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian proses hukumnya berbeda dengan apa yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Proses hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di bawah umur harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut.¹²

Belum cukup umur merupakan suatu alasan yang dapat meringankan pembedaan karena memungkinkan anak untuk memperbaiki perbuatannya dan diharapkan menjadi warga negara yang baik setelahnya. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Sumenep berpedoman pada ketentuan Undang-Undang SPPA mulai dari tahap penangkapan, penyidikan dan penahanan. Polres Sumenep dalam melakukan penyidikan terhadap anak, dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan dalam hal-hal tertentu dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku pencurian juga menggunakan bantuan Polisi Pria namun tetap mengacu pada tata cara yang telah diatur dalam undang-undang.

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya menangani anak yang melakukan pencurian wajib menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, tidak memaksa anak, tidak memakai atribut dan seragam dinas yang dapat menyebabkan anak merasa terancam sehingga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak. berdasarkan hal tersebut maka, saat pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, Polrest Sumenep sebelumnya berkordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang memiliki wewenang khusus memeriksa atau menyidik anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, tokoh agama, psikolog dan tenaga ahli lainnya yang ada di Sumenep. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bripka Teguh Cahyanto, S.H. mengenai penerapan proses diversi pada tahap penyidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berusia 12 (dua belas) Tahun (PP No. 65 Tahun 2015) serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang

¹²Wawancara dengan Teguh Cahyanto, S.H, selaku Banit PPA Polres Sumenep 18 Oktober 2020.

Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bripka Teguh Cahyanto, S.H. juga mengungkapkan bahwa diversi pada tahap penyidikan di Polres Sumenep banyak yang berhasil dilakukan, khususnya pada tindak pidana ringan seperti pencurian dan penganiayaan ringan, namun ada pula yang gagal diupayakan diversi. Pada perkara tindak pidana pencurian di Polres Sumenep tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat beberapa proses diversi yang gagal, yang diakibatkan oleh pihak keluarga korban tidak menghendaki adanya perdamaian.¹³ Dan apabila pengupayaan mediasi atau proses diversi tidak berhasil dilakukan atau tidak menemukan kesepakatan dari kedua pihak khususnya pihak keluarga korban maka harus mengacu pada *Due Process Of Law* dalam artian setiap penerapan dan penegakan hukum pidana harus tetap sejalan dengan apa yang menjadi ketentuan secara konstitusional, sehingga hak asasi anak tetap dapat terlindungi.¹⁴

Berlandaskan penuturan Bripka Teguh Cahyanto, S.H. saat dilakukan wawancara di Polres Sumenep, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan dan menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumenep yakni upaya preventif dan upaya represif, upaya semacam ini dilakukan dengan menggandeng lembaga sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, media cetak, elektronik dan Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Sumenep.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan untuk mencapai rasa kemanan, kesejahteraan dan keseimbangan hidup yang nyaman dan berkedamaian. Dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap anak yang melakukan pencurian, Kepolisian Resort Sumenep sebagai penegak hukum melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai upaya menerapkan dan mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta tetap berdasar pada ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵ Faktor yang mendorong dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian di wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumenep adalah karena anak sama seperti orang dewasa yang mendapatkan harkat dan martabat dari Sang Pencipta, harkat dan martabat anak bersifat kodrati karena itu tidak ada alasan apapun,

¹³ Wawancara dengan Teguh Cahyanto, S.H, selaku Banit PPA Polres Sumenep 18 Oktober 2020.

¹⁴ Wagiaty, Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2013. hlm. 35-45.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dalam bentuk apa pun, untuk mengabaikan hal itu. Sebab harkat dan martabat anak merupakan Hak Asasi Manusia.¹⁶

Selain itu kata Banit PPA Polres Sumenep Teguh Cahyanto, S.H alasan mengapa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) perlu mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan dan perlindungan hukum salah satunya adalah karena anak yang masih dibawah umur memiliki masa depan, serta psikologinya perlu dirawat, dijaga dan difikirkan karena anak masih labil sehingga anak dalam berfikir tidak luas dan tidak jauh kedepan serta tidak dapat menjangkau terhadap akibat hukum yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. oleh sebab itu perlu adanya penyadaran, pembinaan, pembimbingan dan perlindungan terhadap anak dibawah umur, sehingga diharapkan anak tidak mengulagi perbuatannya kembali.

Alasan lain mengapa anak perlu dan butuh dilindungi oleh orang tua, masyarakat dan Negara atau Undang-Undang diantaranya adalah karena :

- a. Anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa.

Sama seperti orang dewasa yang mendapatkan harkat dan martabat dari Sang Pencipta, anak juga memiliki harkat dan martabat. Harkat dan martabat anak bersifat kodrati karena itu tidak ada alasan apapun, dalam bentuk apa pun, untuk mengabaikan hal itu. Sebab harkat dan martabat anak merupakan hak asazinya.

- b. Karena anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asazinya.

Perlindungan yang wajar dari orang dewasa, baik fisik maupun psikis, terhadap anak mutlak dilakukan. Jelas, disini tidak ada pengekangan tetapi juga bukan kebebasan yang tanpa kontrol (kebablasan). Anak yang diberi kebebasan tanpa kontrol justru akan menimbulkan persoalan serius bagi orang tua.

- c. Karena perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi.

Inilah yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak. Tidak memberikan perlindungan kepada anak sama artinya dengan tidak mengindahkan atau melakukan pelanggaran terhadap hak asasi anak.

- d. Karena anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri.

Kita tahu, pada dasarnya anak dalam usia tertentu belum cukup mampu melindungi diri mereka sendiri. Itu sebabnya menjadi tugas orang dewasa untuk memberikan

¹⁶ Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya akan disebut UUD 1945.

perlindungan kepada mereka. Dan untuk maksud itulah anak ada di tengah-tengah orang dewasa.

Anak-anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa.

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengindikasikan hal ini.

Disebutkan bahwa anak memiliki sejumlah yaitu hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dan hak-hak ini harus mendapatkan jaminan. Jika tidak ada jaminan dari Negara melalui undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak, maka anak tidak akan dapat hidup, tidak akan dapat tumbuh, tidak akan dapat berkembang, dan tidak akan dapat berpartisipasi secara optimal. Sehingga jika demikian nanti akan mengakibatkan terhadap mundurnya generasi bangsa. Oleh sebab itu menjadi sangat penting adanya jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindakan melawan hukum termasuk melakukan pencurian.

Keberhasilan Polres Sumenep dalam melaksanakan penegakan hukum dan memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana serta dalam menekan angka pencurian yang dilakukan oleh anak tidak hanya disebabkan oleh pelaksanaan hukumnya semata, melainkan karena adanya beberapa upaya yang dilakukan, seperti kerjasama dengan PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama di Kabupaten Sumenep. Dan juga secara konsisten melakukan sosialisasi ke Kecamatan-Kecamatan untuk mensosialisasikan dan memberikan penyadaran mengenai pentingnya menjaga, merawat dan melindungi anak serta memberikan dukungan terhadap orang tua untuk selalu mendidik, mengontrol dan melakukan pengawasan penuh terhadap anaknya dalam pergaulannya. Sehingga penegak hukum penyidik anak di lingkungan Kepolisian Resort Sumenep dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal baik dari segi efisiensi dan efektivitas dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Sumenep.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resort Sumenep terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Sumenep adalah pengupayaan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dalam penyelesaian tersebut anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung di proses sebagaimana

orang dewasa pada umumnya, melainkan diupayakan proses diversi sesuai dengan isi atau perintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Proses penyelesaian perkara ini Kepolisian Resort Sumenep lebih awal mempertemukan kedua belah pihak antara pihak korban dan pihak keluarga pelaku dengan maksud untuk menyelesaikan perkara anak dengan cara kekeluargaan atau musyawarah mufakat yang tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan perdamaian, permintaan maaf antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, serta mendorong kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

2. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga dikatakan sebagai seseorang yang tidak cakap hukum, dalam berfikir dan bertindak anak cenderung tidak rasional dan tidak dapat mempertimbangkan konsekwensi hukumnya dari tindakan yang dilakukan. Anak memiliki masa depan yang sangat berharga untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Nasional dimasa mendatang, sehingga perlu adanya jaminan perlindungan hukum terhadap anak agar anak dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Selain itu menerapkan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Sumenep adalah perintah undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Saran

1. Dalam hal mewujudkan penegakan supremasi hukum yang baik terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik pencurian atau yang lain hendaknya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu untuk terus berbenah meningkatkan pelayanan, pemenuhan sarana dan fasilitas pendukung seperti ruang tahanan khusus anak yang sesuai standar di lingkungan Polres Sumenep sendiri agar proses peradilan atau penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Perlu adanya tindakan preventif seperti meningkatkan sosialisasi secara intens ke Masyarakat tentang pentingnya menjaga, melindungi dan membentengi anak dari

tindakan kriminal, terus melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, guru ngaji, tokoh Agama dan Masyarakat. Hal itu penting untuk terus dilakukan oleh Kepolisian di lingkungan Pemkab Sumenep guna menekan terjadinya tindakan kriminal di lingkungan anak seperti, pencurian, pemalakan, penganiayaan, pencabulan, minum-minuman keras dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum serta tindakan yang meresahkan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angger Sigit Pramugti dan Faudy Primaharsha, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta; Pustaka Yustisia, 2015).
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi.
- Soejono soekamto, (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya akan disebut UUD 1945
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “*Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya*”.
- Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak.
- Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

- Arfan Kaimuddin, 2015, *Perlindungan Hukum korban Tindak Perdana Pencurian ringan pada Proses diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum Vol, 8

Wawancara

Wawancara dengan Teguh Cahyanto, S.H, selaku Banit PPA Polres Sumenep 18 Oktober 2020.